



PERAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA SEBAGAI ORGANISASI INTERNASIONAL DALAM KASUS PERANG RUSIA-UKRAINE

Made Krishna Dwipayana Aryawan¹, Hartana², Dewa Gede Sudika Mangku³, Ni Putu Rai Yuliantini⁴, Endah Rantau Sari⁵

¹ Universitas Pendidikan Ganesha. E-mail : krishna.dwipayana@undiksha.ac.id

² Universitas Bung Karno Jakarta. E-mail : hartana_palm@yahoo.com

³ Universitas Pendidikan Ganesha. E-mail : dewamangku.undiksha@gmail.com

⁴ Universitas Pendidikan Ganesha. E-mail : raiyluliantini@gmail.com

⁵ Universitas Tanjungpura. E-mail : endah.rantau.itasari@hukum.untan.ac.id

Info Artikel

Masuk: 12 Februari 2023

Diterima: 1 Maret 2023

Terbit: 1 April 2023

Keywords:

Russia, Ukraine, UN, Role, Goals, Functions

Kata kunci:

Rusia, Ukraina, PBB, Peran, Tujuan, Fungsi

Corresponding Author:

Made Krishna Dwipayana Aryawan

E-mail :

krishna.dwipayana@undiksha.ac.id

Abstract

The world was quite surprised and concerned about the tensions that had arisen between Russia and Ukraine which began at the end of last year. When tens of thousands of Russian troops were originally stationed on the Ukrainian border. Followed by NATO and the United States starting to act and making tensions started to increase and the crisis would definitely get worse. The role, goals and functions of the United Nations in resolving conflicts were discussed in this essay and their impact on achieving this resolution since The UN had a significant responsibility to find a solution to this problem. This article used a normative juridical design because the data were obtained from literary sources which came from related articles and books. The United Nations should played an important role in this matter as a mediating party that could find solutions from both sides because it was the largest international institution. Because Russia had veto rights over these resolutions, it could be said that the consequences of the UN resolutions had not produced results.

Abstrak

Dunia cukup dikejutkan dan prihatin dengan ketegangan yang muncul antara Rusia dan Ukraina yang mulai dilakukan dipengujung tahun kemarin. Ketika puluhan ribu pasukan Rusia awalnya ditempatkan di perbatasan Ukraina. Dilanjutkan dengan NATO dan Amerika Serikat mulai bertindak dan membuat ketegangan mulai meningkat dan krisis pasti akan semakin parah. Peran, tujuan, dan fungsi PBB dalam menyelesaikan konflik dibahas dalam esai ini beserta dampaknya dalam mencapai resolusi tersebut karena PBB memiliki tanggung jawab yang signifikan untuk menemukan solusi atas masalah ini. Artikel ini menggunakan design yuridis normatif karena data didapatkan dari sumber kepustakaan yang mana itu berasal dari artikel dan buku-bukuyang terkait.

PBB seharusnya memainkan peran penting dalam masalah ini sebagai pihak mediasi yang dapat menemukan solusi dari kedua belah pihak karena merupakan lembaga internasional terbesar. Karena Rusia memiliki hak veto atas resolusi-resolusi tersebut, maka dapat dikatakan bahwa konsekuensi dari resolusi-resolusi yang dikeluarkan PBB tersebut belum membuahkan hasil.

@Copyright 2023.

PENDAHULUAN

Setiap negara tentunya memiliki ruang yurisdiksi akan teritorialnya secara mutlak. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, diperlukan adanya kerjasama yang dilakukan secara internasional yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan antar negara yang berkaitan¹. Untuk itu diperlukan organisasi internasional untuk mewujudkannya. Disebutkan bahwa munculnya organisasi internasional dikarenakan oleh adanya suatu kebutuhan atau kepentingan antar negara sehingga ini dijadikan wadah untuk melakukan kerjasama ini². Organisasi internasional ini lah yang akan menyematani negara-negara di dunia melalui suatu sistem kerja sama dengan badan-badan yang dianggap bisa unruk mencegah maupun menyelesaikan perselisihan yang timbul di antara mereka yang bersengketa³. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, tentunya setiap organisasi internasional yang ada memiliki suatu kaidah-kaidah hukum internasional yang berlaku entah itu secara privat yang mana itu khusus untuk keanggotaannya saja atau secara universal⁴. Tirta melanjutkan bahwa kaidah-kaidah ini akan dilimpahkan dalam bentuk keputusan-keputusan yang dianggap memiliki suatu strata dan daya mengikat dengan prinsip dan kaidah hukum internasional lainnya⁵. Berkaitan dengan penjelasan di atas, maka pada tahun 1945 dibentuklah suatu organisasi internasional yang diberi nama Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) atau *United Nations General Assembly* (UNGA) dalam bahasa Inggris, yang mana PBB ini tepatnya muncul setelah Perang Dunia Kedua untuk membawa misi untuk pemeliharaan, perdamaian, dan keamanan internasional⁶. Dengan dibentuknya PBB ini, maka diharapkan adanya pencegahan munculnya suatu konflik, membantuk pihak-pihak berkonflik, dan mewujudkan perdamaian dunia –antar negara. Ini didukung dengan isi piagam PBB yang menyebutkan, “We the peoples of the United Nations determined to save succeeding generations from the scourge of

¹ Sianturi, “Peran Pbb Sebagai Organisasi Internasional Dalam Menyelesaikan Sengketa Yurisdiksi Negara Anggotanya Dalam Kasus State Immunity Antara Jerman Dengan Italia Terkait Kejahatan Perang Nazi.”

² Suherman, *Organisasi Internasional & Integritas Ekonomi Regional Dalam Perspektif Hukum Dan Globalisasi*.

³ Mauna, *Hukum Internasional – Pengertian, Peranan, Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*.

⁴ Tirta, “Kekuatan Resolusi Majelis Umum Pbb (Unga) Dan Dewan Keamanan Pbb (Unsc) Sebagai Sumber Hukum Internasional.”

⁵ Tirta.

⁶ Fadillah et al., “Peran Persatuan Dalam Perdamaian Dari Pertikaian Antar Negara Menciptakan.”

⁷ Nasu, “The UN Security Council’s Responsibility and the ‘Responsibility to Protect.’”

war, which twice in our lifetime has brought untold sorrow to mankind, and to reaffirm faith in fundamental human rights...” yang memiliki arti kami Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bertekad untuk menyelamatkan generasi penerus dari ancaman perang, yang telah membawa kesedihan yang tak terhitung kepada umat manusia, dan untuk menegaskan kembali keyakinan pada hak asasi manusia..⁸ Dewan Keamanan PBB adalah unit yang memiliki otoritas untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Di lain sisi, Dewan Keamanan PBB juga dianggap sebagai pemimpin penentu jika terjadi suatu ancaman atau tindakan agresi yang bisa membahayakan perdamaian⁹¹⁰. Selain itu, Dewan Keamanan PBB berperan aktif untuk mengarahkan pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan konflik dengan cara yang lebih aman atau damai dan juga memberikan sugesti-sugesti tentang metode-metode yang bisa dilakukan dan sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku¹¹. Ini juga tertuang dalam pasal 2 ayat (3) Piagam PBB yang berisi “All members shall settle their international disputes by peaceful means in such manner that international peace and security, and justice, are not endangered” yang mana pasal ini berarti bahwa setiap anggota PBB memiliki kewajiban untuk menengahi atau menyelesaikan setiap konflik internasional dengan cara damai sehingga tidak membahayakan kedamaian dan keamanan dunia¹².

Akhir tahun 2021 adalah tahun dimana terjadi ketegangan antara Rusia dan Ukraina sangat menyita perhatian dari seluruh dunia. Pada bulan November, tentara Rusia menududuki bagian perbatasan dengan pasukan yang berjumlah sekitar 100.000 orang yang dilengkapi dengan alat peralatan militer beserta pendukungnya¹³¹⁴. Menurut intelijen Barat, serangan Rusia ke Ukraina diperkirakan akan segera terjadi. Menurut laporan, Vladimir Putin mendesak NATO untuk menghentikan semua operasi militer di Eropa Timur dan Ukraina dengan meningkatkan jumlah pasukan Rusia di perbatasan Ukraina. NATO tidak dapat menerima anggota baru dari Ukraina atau negara-negara bekas Uni Soviet lainnya karena penentangan Rusia. Memang, NATO telah tumbuh secara signifikan selama 30 tahun terakhir, dan sekarang mulai mendekati perbatasan Rusia, Vladimir Putin pun segera mengambil tindakan untuk menghentikan salah satu negara bekas Uni Soviet, khususnya Ukraina, untuk bergabung dengan NATO.

Karena pemikiran bahwa orang-orang mampu membangun kepercayaan dan menciptakan dunia yang damai, kaum liberal tidak dapat mendukung perang

⁸ Sianturi, “Peran Pbb Sebagai Organisasi Internasional Dalam Menyelesaikan Sengketa Yurisdiksi Negara Anggotanya Dalam Kasus State Immunity Antara Jerman Dengan Italia Terkait Kejahatan Perang Nazi.”

⁹ Fadillah et al., “Peran Persatuan Dalam Perdamaian Dari Pertikaian Antar Negara Menciptakan.”

¹⁰ Ariye, “The United Nations and Its Peace Purpose: An Assessment.”

¹¹ Prayoga, “PERANAN PERSERIKATAN BANGSA BANGSA (PBB) DALAM MENJALANKAN MISI PASUKAN PENJAGA PERDAMAIAN DI TIMOR TIMUR.”

¹² Sianturi, “Peran Pbb Sebagai Organisasi Internasional Dalam Menyelesaikan Sengketa Yurisdiksi Negara Anggotanya Dalam Kasus State Immunity Antara Jerman Dengan Italia Terkait Kejahatan Perang Nazi.”

¹³ Oktarianisa, “Kronologi Dan Latar Belakang Konflik Rusia Dan Ukraina.”

¹⁴ Adha, “Upaya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Sebagai Organisasi Internasional Dalam Menengahi Konflik Rusia Dan Ukraina Pada 2022.”

dan konflik bersenjata karena mereka percaya bahwa ini bertentangan dengan esensi manusia. Memang adanya peran pemerintah melalui aksi militernya baik di dalam maupun di luar negeri secara artifisial dapat memproduksi perang¹⁵. Keadaan yang terjadi antara Rusia dan Ukraina adalah kondisi buatan yang diciptakan oleh manusia dan tidak berdasarkan esensi dari manusia itu sendiri. Relasi yang tegang dan memanas ini disebabkan oleh faktor-faktor yang melampaui logika dan standar perilaku manusia yang seharusnya bersifat damai¹⁶.

Jelas dapat dilihat bahwa Rusia telah mengabaikan prinsip-prinsip pedoman Piagam PBB. Seperti yang diketahui pada Piagam PBB Pasal 2 ayat 4 Charter of The United Nations and Statue of The International Court of Justice, konsep ini melarang negara menggunakan angkatan bersenjata terhadap negara lain untuk membahayakan stabilitas dan keamanan kawasan lain¹⁷. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa Rusia telah melanggar Pasal 2 ayat 4 Piagam PBB dengan mengirimkan personel militer tambahan ke semenanjung Crimea, yang artinya melanggar wilayah negara Ukraina. Sebuah semenanjung di kawasan Laut Hitam disebut Crimea, dan setelah 1925, Ukraina menganeksasi Crimea¹⁸¹⁹. Untuk mengemban tugas, PBB kemudian mengaktifkan Dewan Keamanan sesuai dengan Pasal 14 untuk membuat upaya pemberhentian konflik antara Rusia dan Ukraina dengan membuat sebuah resolusi untuk perdamaian dan keamanan dunia²⁰²¹. Namun usaha dari resolusi ini, tidak menghasilkan apapun karena adanya Hak Veto yang dimiliki oleh Rusia karena negara ini adalah anggota tetap dari Dewan Keamanan PBB²². Majelis Umum PBB turun tangan setelah resolusi Dewan Keamanan PBB tidak berhasil. Salah satu resolusi yang disahkan oleh Majelis Umum PBB memuat persyaratan yaitu penegasan terhadap keutuhan wilayah Ukraina dalam batas-batas yang diakui secara internasional²³. Ketika warga di Ukraina Barat cenderung memiliki sikap yang berbeda dengan warga di Ukraina Timur, stabilitas politik Ukraina juga memburuk. Presiden Ukraina Victor Yanukovich secara resmi mengundurkan diri dari jabatannya karena ketidakmampuan pemerintah untuk menjaga stabilitas negara pada saat itu. Dia untuk sementara digantikan oleh Presiden Olexander Turchnyov, dan pada 2015, dia digantikan sekali lagi oleh Presiden Petro Poroshenco, yang kemudian membentuk pemerintahan baru di

¹⁵ Adha.

¹⁶ Adha.

¹⁷ Dewi Aisyah and Arlina Permanasari, "TINJAUAN NORMATIF PERAN DEWAN KEAMANAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA (PBB) DALAM MENJAGA PERDAMAIAN DUNIA (Studi Kasus KONFLIK ANTARA RUSIA DAN UKRAINA)."

¹⁸ Dewi Aisyah and Arlina Permanasari.

¹⁹ Douhan, "International Organizations and Settlement of the Conflict in Ukraine."

²⁰ Kristian, "Peran Dewan Keamanan PBB Dalam Menyelesaikan Konflik Bersenjata Internasional Tanpa Melanggar Prinsip Non-Intervensi."

²¹ Tirta, "Kekuatan Resolusi Majelis Umum Pbb (Unga) Dan Dewan Keamanan Pbb (Unsc) Sebagai Sumber Hukum Internasional."

²² Bebler, "Freezing a Conflict: The Russian—Ukrainian Struggle over Crimea."

²³ Dewi Aisyah and Arlina Permanasari, "TINJAUAN NORMATIF PERAN DEWAN KEAMANAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA (PBB) DALAM MENJAGA PERDAMAIAN DUNIA (Studi Kasus KONFLIK ANTARA RUSIA DAN UKRAINA)."

Ukraina yang pro-Uni Eropa. Pola-pola ini menghasilkan keamanan negara bagian Federasi²⁴.

Peran PBB dalam mengembangkan strategi resolusi konflik yang digunakan untuk menghentikan eskalasi perang antara Rusia dan Ukraina dibahas dalam esai ini, beserta fungsi, tujuan, dan perannya. Penulis juga akan mendemonstrasikan relevansi isu dan resolusi PBB serta mampu atau tidaknya meredakan ketegangan perang antara Rusia dan Ukraina.

METODE PENELITIAN

Strategi yuridis normatif diadopsi dalam proses penulisan artikel ini, yang mana ini melibatkan penelitian melalui data sekunder dan sumber kepustakaan yang mana itu berasal dari artikel dan buku-buku yang memiliki topik yang sama. Dalam penelitian ini, penelitian yuridis normatif digunakan untuk menyelidiki bagaimana PBB dapat membantu menyelesaikan konflik bersenjata antara Rusia dan Ukraina. Analisis adalah metode yang digunakan dalam penelitian ini. Dengan ini, penulis mengkaji tindakan yang diambil untuk menegakkan hukum humaniter internasional ketika Dewan Keamanan PBB membantu mengakhiri konflik antara Rusia dan Ukraina.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertama kali Rusia secara resmi menyatakan perang terhadap Ukraina adalah pada tanggal 24 Februari 2022, tetapi kedua negara initelah terlibat dalam perang dunia maya sejak Rusia menguasai Crimea pada tahun 2014. Kedua negara tersebut, terutama Rusia dan Ukraina terpaksa terlibat dalam perang yang berlarut-larut sebagai akibat dari hubungan yang sedang menegang²⁵. Tatanan dunia internasional, yang dalam hal ini meliputi politik internasional, keamanan, dan ekonomi, tidak diragukan lagi dipengaruhi oleh pertempuran antara kedua negara ini.

Saat berita ini sampai ke telinga PBB yang mana ini adalah sebuah organisasi internasional yang memiliki tanggung jawab besar akan perdamaian kedua belah pihak dan juga bertugas untuk memperbaiki keadaan ekonomi dan politik di kedua negara ini (UN News, 2022), oleh karena itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengklasifikasikan serangan ini sebagai tindakan kekerasan dalam integritas teritorial dan kedaulatan Ukraina yang melanggar prinsip-prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa pada awal deklarasi perang Rusia pada Februari 2022, yang juga disertai dengan peluncuran serangan militer ke wilayah kedaulatan Ukraina pada 23 dan 24 Februari²⁶²⁷.

²⁴ Dewi Aisyah and Arlina Permanasari.

²⁵ Adha, "Upaya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Sebagai Organisasi Internasional Dalam Menengahi Konflik Rusia Dan Ukraina Pada 2022."

²⁶ Adha.

²⁷ Dewi Aisyah and Arlina Permanasari, "TINJAUAN NORMATIF PERAN DEWAN KEAMANAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA (PBB) DALAM MENJAGA PERDAMAIAN DUNIA (Studi Kasus KONFLIK ANTARA RUSIA DAN UKRAINA)."

PBB melalui satuan unitnya yang disebut UNRIC (United Nations Regional Information Centre) dan juga ICC (International Criminal Court) mulai menginvestigasi hal yang dianggap sebagai kejahatan perang karena mencederai kemanusiaan yang terjadi di wilayah Rusia dan Ukraina pada tanggal 28 Februari²⁸²⁹. Selain itu, menanggapi konflik dan perang yang semakin intensif di tanah Ukraina, UNHCR (Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa) juga mulai menerapkan resolusi yang menyerukan pembentukan segera komisi investigasi internasional yang tidak memihak (independent international commission of inquiry). Resolusi ini disetujui pada 5 Maret 2022. International Court of Justice (ICC) atau Mahkamah Internasional kemudian meminta agar Rusia menghentikan semua aksi militer di Ukraina pada 16 Maret 2022³⁰. Majelis Umum PBB atau *United Nation General Assembly* akhirnya mengeluarkan resolusi pada 7 April 2022, menyampaikan permintaan Dewan Hak Asasi Manusia (Human Rights Council) kepada negara Rusia untuk menghentikan aktivitas bersenjata demi kepentingan kemanusiaan. Ketika 93 negara mendukung resolusi atau setuju dengannya dalam pemungutan suara yang substantif, dan 24 negara berpikir sebaliknya. Dapat disimpulkan resolusi ini menerima 2/3 mayoritas dari negara-negara anggota PBB.

Fungsi PBB dalam Konflik Rusia dan Ukraina

PBB telah digadang untuk menjadi sebuah organisasi internasional yang ditugaskan untuk menjaga perdamaian dunia untuk keselamatan ras manusia. Seperti yang telah diketahui, pernyataan ini didukung oleh pembukaan Piagam PBB yang berbunyi “We the peoples of the United Nations determined to save succeeding generations from the scourge of war.” yang diterjemahkan sebagai Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bertekad untuk menyelamatkan generasi penerus dari ancaman perang³¹³²³³. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa PBB memainkan peran penting dalam penyelesaian konflik internasional, termasuk perselisihan Rusia-Ukraina yang dimaksud. PBB, sebuah organisasi internasional yang terdiri dari banyak negara yang berbeda, dianggap sangat penting untuk keberhasilan penyelesaian perang antara kedua negara. Demi perdamaian dan kelangsungan hidup umat manusia di dunia, semua negara yang secara aktif terlibat

²⁸ Sef, “Serangan Balik! Ukraina Serbu Rusia Di 5 Titik Sekaligus.”

²⁹ Adha, “Upaya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Sebagai Organisasi Internasional Dalam Menengahi Konflik Rusia Dan Ukraina Pada 2022.”

³⁰ Adha.

³¹ Sianturi, “Peran Pbb Sebagai Organisasi Internasional Dalam Menyelesaikan Sengketa Yurisdiksi Negara Anggotanya Dalam Kasus State Immunity Antara Jerman Dengan Italia Terkait Kejahatan Perang Nazi.”

³² Adha, “Upaya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Sebagai Organisasi Internasional Dalam Menengahi Konflik Rusia Dan Ukraina Pada 2022.”

³³ Fadillah et al., “Peran Persatuan Dalam Perdamaian Dari Pertikaian Antar Negara Menciptakan.”

dan mematuhi semua aturan harus serta benar-benar menjunjung dan merujuk pada piagam PBB³⁴.

Di lain sisi, PBB juga mempunyai beberapa fungsi tambahan yang diantaranya adalah fungsi proteksi, integrasi, sosialisasi, pengendali konflik, koorperatif, negosiasi, dan arbitrase³⁵. Dalam situasi Rusia-Ukraina, PBB dituntut untuk menjalankan peran pengendali perang/konflik, arbitrase, dan negosiasi. Yang dimaksud dengan pengendalian konflik disini adalah bahwa PBB berfungsi sebagai aktor yang mendorong kolaborasi antara Ukraina dan Rusia guna menghentikan konflik yang telah meningkat di antara dua negara yang bersengketa. Dalam situasi ini, PBB harus mampu berperan sebagai otoritas atau lembaga pengendali agar konflik tidak pecah semakin parah. Mengenai hal ini, PBB telah mencapai banyak hal melalui banyak entitas afiliasinya. Ini menunjukkan bahwa PBB melakukan upaya bersama untuk mencegah dan mencoba menghentikan pengiriman personel militer Rusia ke Ukraina. Rusia telah diperintahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, untuk menghentikan semua aksi militer atas dasar kemanusiaan³⁶. Jadi dapat disimpulkan, dengan mengeluarkan resolusi yang dianggap efektif dalam mengurangi dampak perang itu sendiri, sebagai badan kelembagaan yang mengatur konflik, PBB telah berupaya mewujudkan perdamaian.

Untuk fungsi negosiasi, PBB bisa dikatakan menjadi penengah atau fasilitator untuk setiap pertemuan yang melibatkan pihak-pihak yang berkonflik sehingga tercapai kesepakatan bersama yang adil dan berlangsung secara progresif. Dalam kasus Rusia-Ukraina, PBB bertanggung jawab untuk mempertemukan kedua belah pihak guna membahas jalan keluar atas konflik yang sedang terjadi. Mengenai hal ini, lima negara anggota permanen yang termasuk ke dalam Dewan Keamanan dipanggil oleh para Majelis Umum PBB dan diminta untuk membenarkan penggunaan hak veto, walaupun seringkali hak veto disalahgunakan³⁷. Masih ada keuntungan dan kerugian, terutama untuk negara permanen di dewan keamanan PBB, sehingga tampaknya negosiasi masih bisa berjalan tanpa hambatan yang berarti.

Dilanjutkan dengan fungsi arbitrase yang mana PBB memiliki fungsi dalam penyelesaian konflik sehingga nantinya tidak akan terulang lagi di masa depan. Dalam kasus Rusia-Ukraina, karena konflik ini berdampak signifikan dalam skala global, seperti kenaikan harga minyak dan gandum yang sudah mencapai tahap kritis, maka PBB harus menggunakan seluruh kewenangannya untuk melakukan upaya penyelesaian konflik, seperti melakukan negosiasi dan mengintensifkan pertemuan. antara kedua belah pihak³⁸. Adha & Mubin juga menambahkan bahwa tingginya jumlah warga Ukraina yang pindah ke Polandia juga akan menimbulkan masalah yang signifikan karena peningkatan populasi Polandia yang dapat

³⁴ Adha, "Upaya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Sebagai Organisasi Internasional Dalam Menengahi Konflik Rusia Dan Ukraina Pada 2022."

³⁵ Meisler, *United Nations : A History*.

³⁶ Meisler.

³⁷ Adha, "Upaya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Sebagai Organisasi Internasional Dalam Menengahi Konflik Rusia Dan Ukraina Pada 2022."

³⁸ Adha.

menyebabkan peningkatan tajam dalam pengangguran dan kemiskinan³⁹. PBB harus bertindak secepatnya untuk memenuhi kewajibannya dalam upaya untuk mengakhiri konflik Rusia-Ukraina sebanyak mungkin mengingat banyak efek pada skala global.

Tujuan PBB dalam konflik Rusia dan Ukraina

Menurut pasal 1 Piagam PBB, disebutkan beberapa tujuan dari organisasi internasional ini, antara lain “memelihara keamanan dan perdamaian internasional, memajukan hubungan antar bangsa atas dasar persamaan hak dan penentuan nasib dari bangsa itu sendiri, menggunakan kerjasama internasional sebagai sarana dalam menyelesaikan persoalan, internasional di berbagai bidang, serta sebagai pusat bagi penyelarasan segala tindakan negara dalam mencapai sebuah tujuan.”⁴⁰⁴¹ Jadi dapat dikatakan, PBB memiliki tujuan untuk mempromosikan perdamaian dan keamanan internasional dalam upayanya untuk menyelesaikan konflik antara Rusia dan Ukraina. Secara umum, PBB berupaya menegakkan perdamaian di dunia dan mendorong kerja sama internasional yang setara. Piagam PBB menguraikan prinsip-prinsip panduan yang memandu organisasi dalam menjalankan tugasnya, antara lain bahwa PBB didasarkan pada kedaulatan kesetaraan di antara para anggotanya, bahwa setiap anggota memiliki aspirasi yang tinggi dalam memenuhi kewajibannya, tidak menggunakan kekerasan untuk mengancam negara lain, dan bahwa Piagam PBB tidak digunakan untuk mencampuri urusan dalam negeri negara anggota. Semua negara yang setuju untuk mematuhi isi dari Piagam PBB dan mampu melaksanakan komitmennya berhak untuk bergabung dengan organisasi internasional ini. Tujuan utama Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah untuk mempromosikan perdamaian internasional dengan mengurangi kemungkinan konflik di masa depan. Upaya PBB seharusnya berhasil mengingat pengaruhnya yang besar dan fakta bahwa banyak negara mendukung penghentian cepat perang Rusia-Ukraina.

Dalam 10 minggu pertama setelah Rusia mulai menggunakan kekuatan militer melawan Ukraina untuk pertama kalinya, Dewan Keamanan PBB melakukan banyak upaya untuk mengeluarkan resolusi yang bertujuan mengakhiri konflik. Tindakan ini menjadi bukti keseriusan PBB dalam hal ini. Dewan Keamanan PBB berusaha untuk melakukan pembicaraan dengan anggotanya tentang masalah ini untuk meminta Rusia memindahkan semua personel dan peralatan militernya dari Negara Ukraina. Hal itu dilakukan agar bantuan kemanusiaan dapat lebih mudah diberikan kepada warga Ukraina yang terkena dampak perang kedua negara. Sebagai hasil dari penggunaan hak veto Rusia yang konsisten sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB, upayanya selalu tidak berhasil ketika penyelesaian hampir tercapai.

³⁹ Adha.

⁴⁰ Adha.

⁴¹ Ariye, “The United Nations and Its Peace Purpose: An Assessment.”

Peran PBB dalam Konflik Rusia-Ukraina

Sejak 2021, Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menggunakan strategi diplomatik untuk menghentikan eskalasi konflik antara Rusia dan Ukraina saat ini. *Organization for Security and Co-operation in Europe* (OSCE) dan PBB telah mengambil pendekatan diplomatik dengan membicarakan konflik Rusia-Ukraina, layaknya seperti laporan yang diterbitkan oleh PBB melalui situs resmi PBB pada tanggal 31 Januari 2021. Perserikatan Bangsa-Bangsa juga mendesak semua anggota untuk menghindari penggunaan bahasa yang menyinggung dan melakukan tindakan lain yang dapat meningkatkan ketegangan. Tindakan Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah jenis tindakan pencegahan atau preventif untuk meredakan ketegangan atas potensi konflik internasional. Tindakan pencegahan ini juga menunjukkan bahwa PBB mendekati Rusia dan Ukraina secara diplomatis dengan hati-hati untuk menghindari konflik.

Saat perang antara Rusia dan Ukraina akhirnya terjadi, sebagai badan global yang berkontribusi dalam penegakan hukum internasional, PBB juga turut andil. Invasi Rusia ke Ukraina sangatlah dikecam oleh PBB. Biasanya, sesi dewan keamanan PBB berfungsi sebagai sarana PBB untuk menegakkan prinsip-prinsip dasar aturan hukum internasional. Dewan Keamanan PBB bertemu untuk memeriksa potensi sanksi terhadap Rusia karena melanggar hukum internasional serta cara untuk menyelesaikan krisis akibat perang yang sebenarnya⁴². Namun, Rusia menggunakan hak vetonya dalam pertemuan pada 25 Februari 2022, yang mengakibatkan resolusi dewan keamanan dinyatakan tidak sah.

Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan resolusi tentang konflik antara Ukraina dan Rusia pada hari Jumat, 4 Maret 2022. Resolusi ini khusus untuk Rusia, yang telah menginvasi, dan memuat tujuh poin, termasuk⁴³:

1. “Mengecam (deplere) dengan istilah terkuat terhadap agresi dari Federasi Rusia melawan Ukraina, serta mengutuk (*condemn*) deklarasi 24 Februari 2022 oleh Federasi Rusia terkait 'operasi militer khusus' di Ukraina.” Resolusi tersebut juga menuntut agar Rusia mematuhi Piagam PBB Pasal 2, yang melarang anggotanya untuk secara paksa melanggar integritas teritorial negara lain.
2. Menuntut agar keputusan yang dibuat oleh Federasi Rusia mengenai status wilayah tertentu Ukraina di Donetsk dan Luhansk segera dan tanpa syarat dibatalkan. Dan juga, menuntut Federasi Rusia untuk mengevakuasi semua pasukan militernya dari wilayah Ukraina di dalam perbatasan yang diakui secara internasional dengan segera, total, dan tanpa syarat.
3. Menuntut agar semua ancaman kekerasan di luar hukum atau penggunaan kekuatan terhadap Negara Anggota mana pun, termasuk Ukraina, segera dihentikan. Mengungkapkan rasa kekhawatiran ekstrim tentang laporan penyerangan terhadap sasaran sipil seperti rumah, rumah sakit, dan sekolah serta kematian warga sipil yang diakibatkannya, termasuk wanita, anak-anak, orang tua, dan penyandang disabilitas.

⁴² Danial, “Peranan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Dalam Proses Penyelesaian Konflik Internasional.”

⁴³ Daenuri, “Peran Perserikatan Bangsa – Bangsa Dalam Menengahi Konflik Rusia Dan Ukraina.”

4. Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menyatakan bahwa mereka tidak akan mengakui wilayah mana pun yang direbut dengan penggunaan kekuatan militer.
5. Mengingatkan semua Negara tentang kewajiban mereka berdasarkan Pasal 2 Piagam PBB untuk menghindari penggunaan kekerasan, ancaman untuk menggunakan kekerasan, atau tindakan lain yang tidak sesuai dengan tujuan PBB untuk menyelesaikan konflik internasional secara damai.
6. PBB juga mengkhawatirkan potensi dampak konflik dari kerawanan pangan global, mengingat bahwa wilayah tersebut adalah salah satu pengekspor utama gandum dan produk pertanian lainnya di seluruh dunia.
7. Mengutuk keputusan Federasi Rusia untuk memperkuat kesiapan pasukan nuklirnya.

Namun, dengan membawa masalah ini ke Majelis Umum PBB, PBB memiliki tindakan alternatif terhadap Rusia yang telah melanggar hukum internasional. Resolusi majelis umum PBB adalah jenis resolusi yang tidak dapat diveto oleh anggota dewan keamanan, tetapi hasilnya tidak mengizinkan PBB untuk mengirim pasukan penjaga perdamaian ke zona perang. Hasil dari resolusi majelis umum secara tidak langsung masih dapat mempengaruhi Rusia. Negara lain dapat menerapkan sanksi bilateral atau multilateral terhadap Rusia dengan menggunakan resolusi majelis umum PBB sebagai panduan mendasar. Resolusi majelis umum PBB juga bertindak sebagai pedoman normatif yang memandu tindakan PBB dalam memberikan bantuan kemanusiaan ke Ukraina. PBB, di sisi lain, selalu tersedia sebagai pihak netral yang dapat menawarkan saran untuk meningkatkan hubungan bilateral antara Rusia dan Ukraina dan terus memberikan informasi terbaru mengenai perang antar dua negara tersebut.

Salah satu aspek dari tugas langsung PBB sebagai organisasi internasional adalah memutuskan tindakan apa yang harus diambil untuk mencegah eskalasi konflik lebih lanjut. Perserikatan Bangsa-Bangsa, sebuah badan yang berupaya menegakkan perdamaian internasional, memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukannya. Akibatnya, upaya PBB untuk menghentikan eskalasi konflik adalah yang paling dapat dilakukan oleh organisasi mengingat dalam menjalankan tindakan ini, mereka harus berhati-hati untuk mencegah eskalasi dan pertumbuhan konflik. Karena kekuatan dan status Rusia yang besar sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB, PBB lebih sering menahan diri untuk tidak terlibat dalam konflik.

PENUTUP

Kesimpulan

Dapat disimpulkan bahwa PBB telah memenuhi tugasnya sebagai organisasi internasional. Keterlibatan PBB dalam konflik antara Rusia dan Ukraina merupakan aplikasi normatif dari maksud, tujuan, dan statusnya sebagai badan internasional. Di mana PBB terus berfungsi meskipun beberapa kali gagal untuk beresolusi, dan di mana juga tidak ada titik kontak diplomatik antara PBB sebagai organisasi internasional dan Rusia sebagai negara yang memiliki kepentingan dan konflik di wilayah Ukraina. Perserikatan Bangsa-Bangsa juga mengambil sejumlah tindakan

pengecahan untuk mengurangi dampak agresi militer Rusia. Tindakan preventif merupakan upaya untuk menghentikan eskalasi konflik antara Rusia dan Ukraina. Hal itu tetap dilakukan dengan pola pikir kehati-hatian agar konflik tidak semakin parah. Namun, konflik tersebut akhirnya pecah, memaksa PBB untuk bertindak represif dalam menanggapi pelanggaran Rusia terhadap hukum internasional. Di sisi lain, PBB niscaya memiliki prioritas lain di masa depan jika ingin dapat mencegah perang yang membahayakan keberadaan manusia dan keberlangsungan perdamaian internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Adha, Moehamad Risky. "Upaya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Sebagai Organisasi Internasional Dalam Menengahi Konflik Rusia Dan Ukraina Pada 2022." *Jurnal Pena Wimaya* 2, no. 2 (2022).
- Ariye, Ekpotuatin Charles. "The United Nations and Its Peace Purpose: An Assessment." *Journal of Conflictology* 5, no. 1 (2014): 24–32. <https://doi.org/10.7238/joc.v5i1.1827>.
- Bebler, Anton. "Freezing a Conflict: The Russian—Ukrainian Struggle over Crimea." *Israel Journal of Foreign Affairs* 8, no. 3 (2014): 63–73.
- Daenuri, Asep. "Peran Perserikatan Bangsa – Bangsa Dalam Menengahi Konflik Rusia Dan Ukraina." Bandung, 2021.
- Danial. "Peranan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Dalam Proses Penyelesaian Konflik Internasional." *Reuters* 16, no. February (2017): 2328–41.
- Dewi Aisyah, and Arlina Permanasari. "TINJAUAN NORMATIF PERAN DEWAN KEAMANAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA (PBB) DALAM MENJAGA PERDAMAIAN DUNIA (Studi Kasus KONFLIK ANTARA RUSIA DAN UKRAINA)." *TerAs Law Review : Jurnal Hukum Humaniter Dan HAM* 3, no. 2 (2022): 113–26. <https://doi.org/10.25105/terasrev.v3i2.15049>.
- Douhan, Alena F. "International Organizations and Settlement of the Conflict in Ukraine." *ZaöRV* 75 (2015): 195–214. <http://www.zaoerv.de>.
- Fadillah, Rizki, Rahmad Hidayat, Nina Mahrida, Ahmadi Hasan, and Bahran. "Peran Persatuan Dalam Perdamaian Dari Pertikaian Antar Negara Menciptakan." *Journal Of IslamicC and Law Studies* Volume 2, no. 1 (2018): 79–91.
- Kristian, Dodit Yunata. "Peran Dewan Keamanan PBB Dalam Menyelesaikan Konflik Bersenjata Internasional Tanpa Melanggar Prinsip Non-Intervensi." *JEMAR: Journal of Industrial Engineering & Management Research* 2, no. 6 (2022): 103–10.
- Mauna, Boer. *Hukum Internasional – Pengertian, Peranan, Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*. Bandung: P.T. Alumni, 2008.
- Meisler, Stanley. *United Nations: A History*. New York: GROVE/Atlantic Incorporated, 2011.
- Nasu, Hitoshi. "The UN Security Council's Responsibility and the 'Responsibility to Protect.'" *Max Planck Yearbook of United Nations Law Online* 15, no. 1 (2019): 377–418. <https://doi.org/10.1163/18757413-90000073>.

- Oktarianisa, Sefti. "Kronologi Dan Latar Belakang Konflik Rusia Dan Ukraina,," 2022. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220304134216-4-320044/kronologi-dan-latar-belakang-konflik-rusia-dan-ukraina/3>.
- Prayoga, Oky. "PERANAN PERSERIKATAN BANGSA BANGSA (PBB) DALAM MENJALANKAN MISI PASUKAN PENJAGA PERDAMAIAN DI TIMOR TIMUR." Universitas Pasundan, 2017.
- Sef. "Serangan Balik! Ukraina Serbu Rusia Di 5 Titik Sekaligus." *CNBC Indonesia*, March 23, 2022. [https://www.cnbcindonesia.com/news/20220323143059-4-325323/serangan-balik-ukraina-serbu-rusia-di-5-titik-sekaligus#:~:text=Dalam update terbaru Selasa \(22,%2C Borodyanka%2C Kherson dan Mykolaiv](https://www.cnbcindonesia.com/news/20220323143059-4-325323/serangan-balik-ukraina-serbu-rusia-di-5-titik-sekaligus#:~:text=Dalam update terbaru Selasa (22,%2C Borodyanka%2C Kherson dan Mykolaiv).
- Sianturi, Marupa Hasudungan. "Peran Pbb Sebagai Organisasi Internasional Dalam Menyelesaikan Sengketa Yurisdiksi Negara Anggotanya Dalam Kasus State Immunity Antara Jerman Dengan Italia Terkait Kejahatan Perang Nazi." *Journal of International Law* 2, no. 1 (2014): 1-21. <https://media.neliti.com/media/publications/14991-ID-peran-pbb-sebagai-organisasi-internasional-dalam-menyelesaikan-sengketa-yurisdik.pdf>.
- Suherman, Ade Maman. *Organisasi Internasional & Integritas Ekonomi Regional Dalam Perspektif Hukum Dan Globalisasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Tirta, A. Leovardi. "Kekuatan Resolusi Majelis Umum Pbb (Unga) Dan Dewan Keamanan Pbb (Unsc) Sebagai Sumber Hukum Internasional." *Jurnal Yustika* 14, no. 1 (2011): 93-107.
- Hartana, H. (2020). Existence And Development Group Companies In The Mining Sector (PT. Bumi Resources Tbk). *Ganesha Law Review*, 2(1), 54-69.
- Hartana, H. (2019). Initial Public Offering (Ipo) Of Capital Market And Capital Market Companies In Indonesia. *Ganesha Law Review*, 1(1), 41-54.
- Hartana, H. (2016). Hukum Perjanjian (Dalam Perspektif Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara). *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 2(2).
- Hartana, H. (2017). Hukum Pertambangan (Kepastian Hukum Terhadap Investasi Sektor Pertambangan Batubara di Daerah). *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 3(1), 50-81.
- Hartana, H. (2019). Ekspansi Perusahaan Group Ditinjau dari Undang-Undang No. 4 Th. 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma*, 21(2), 40-51.
- Hartana, H. (2017). Proses Merger dan Joint Venture Digunakan dalam Ekspansi Perusahaan Group dalam Sektor Pertambangan Batubara. *Pandecta Research Law Journal*, 12(2), 111-134.
- Purwendah, E. K., & Wahyono, D. J. (2021). WASTE BANK AS AN ALTERNATIVE TO COMMUNITY BASED WASTE MANAGEMENT. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(3), 930-936.

- Purwendah, E. K., Mangku, D. G. S., & Periani, A. (2019, May). Dispute Settlements of Oil Spills in the Sea Towards Sea Environment Pollution. In *First International Conference on Progressive Civil Society (ICONPROCS 2019)* (pp. 245-248). Atlantis Press.
- Itasari, E. R. (2021). Kepatuhan Hukum Negara Indonesia Terhadap Icescr. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(2), 414-422.
- Itasari, E. R. (2020). Pengelolaan Perbatasan Darat Antara Indonesia Dan Malaysia Dalam Pemenuhan Hak Pendidikan Dalam Konstitusi Republik Indonesia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(2), 168-176.
- Nurhayati, B. R. (2019). Harmonisasi Norma Hukum Bagi Perlindungan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia. *Ganesha Law Review*, 1(1), 55-67.
- Mangku, D. G. S., Purwendah, E. K., Itasari, E. R., & Nurhayati, B. R. (2020). Compensation for Oil Pollution Due to Tanker Accidents in the Indonesian Legal System in a Justice Value Perspective. *International Journal of Criminology and Sociology*, 9, 662-669.
- Kristhy, M. E., Hakim, A. L., Widyawan, E., Claudia, C., Limbong, M. R., Sarvon, W., ... & Mahendra, W. (2021). MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT UNTUK MEMATUHI PROTOKOL KESEHATAN DI ERA PPKM DENGAN MEDIA POSTER MELALUI WAGRAM (WHATSAPP, INSTAGRAM DAN YOUTUBE). *J-ABDI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 1(4), 601-610.
- Kristhy, M. E., & Aprilla, A. P. (2022). Hak Atas Satuan Rumah Susun Bagi Warga Negara Asing Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 7(2), 498-506.
- Mangku, D. G. S. (2012). Suatu Kajian Umum tentang Penyelesaian Sengketa Internasional Termasuk di Dalam Tubuh ASEAN. *Perspektif*, 17(3).
- Febriana, N. E., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Upaya Perlawanan (Verzet) Terhadap Putusan Verztek Dalam Perkara No. 604/PDT. G/2016/PN. SGR Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B. *Ganesha Law Review*, 2(2), 144-154.
- Dewi, I. A. P. M., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Anak Dalam Pelanggaran Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Di Kota Singaraja. *Ganesha Law Review*, 2(2), 121-131.